

Judul : Rekening tabungan dicek, ini harapan komisi VII
Tanggal : Minggu, 04 Januari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Rekening Tabungan Dicek Ini Harapan Komisi VII

WAKIL Ketua Komisi VII DPR Chusnunia Chalim mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi Bali melakukan pengecekan rekening tabungan wisatawan mancanegara (wisman) mulai 2026. Kebijakan tersebut bisa diterapkan di seluruh provinsi di Indonesia.

Menurut Chusnunia, kebijakan itu sejalan dengan praktik yang selama ini diterapkan negara lain kepada warga negara Indonesia (WNI) yakni kewajiban melampirkan rekening koran tiga bulan terakhir. Langkah ini juga dinilai sesuai dengan target pengembangan *quality tourism* yang dicanangkan Kementerian Pariwisata (Kemenpar).

"Ini bagian dari upaya mewujudkan pariwisata berkelanjutan. Bahkan saya mengusulkan agar kebijakan ini diberlakukan secara nasional," ujar Chusnunia di Jakarta, Sabtu (3/1/2026).

Politikus PKB itu menegaskan Indonesia tidak sekadar mengejar jumlah kunjungan wisatawan asing. Ia menyoroti maraknya pelanggaran keimigrasian, seperti wisman yang datang dengan tujuan wisata namun justru bekerja tanpa izin. "Wisatawan seperti itu bukan mendatangkan devisa, tetapi justru membawa persoalan. Ini yang sebaiknya kita hindari," tegasnya.

Dia bilang, wisman yang diharapkan datang itu adalah mereka yang memberikan manfaat ekonomi bagi pelaku usaha pariwisata, masyarakat, dan lingkungan sekitar. "Karena itu, saya sepakat dengan Kemenpar bahwa arah pembangunan pariwisata harus menuju *quality*

tourism," ucapnya.

Sejalan dengan itu, anggota Komisi VII DPR Mujakkir Zuhri menegaskan, pariwisata tidak semata-mata diukur dari jumlah kunjungan. Pariwisata harus menitikberatkan pada kualitas pengalaman wisatawan, kesiapan masyarakat lokal, serta sejauh mana manfaat ekonomi kembali ke daerah.

Ia memprediksi, tren pariwisata 2026 akan didominasi oleh *wellness tourism*, ekowisata, wisata kuliner, budaya otentik, serta pemanfaatan teknologi digital. Tren tersebut dinilai sejalan dengan upaya peningkatan devisa, pemberdayaan komunitas lokal, dan penguatan daya saing pariwisata Indonesia di tingkat global.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Bali memastikan akan menerapkan kebijakan penyaringan wisman mulai 2026. Kebijakan ini difokuskan pada kemampuan finansial serta rencana aktivitas wisatawan selama berada di Bali.

Sepanjang 2025, Bali mencatat 7,05 juta kunjungan wisman melalui jalur udara dan sekitar 71 ribu kunjungan melalui jalur laut. Angka ini menjadi rekor tertinggi dalam sejarah pariwisata Bali. Meski berdampak positif secara kuantitas, lonjakan tersebut juga memunculkan tantangan terkait kualitas pariwisata dan perilaku wisatawan.

Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan, Pemprov Bali akan melakukan penyaringan agar wisatawan asing yang datang tidak menimbulkan masalah dan tetap memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah. ■ PYB